

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

1. KEBIJAKAN

- Kebijakan apa saja yang menjadi pedoman pelaksanaan JKJ?
- Siapa saja yang memiliki pengaruh dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan JKJ?
- Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan JKJ?

2. INPUT

- Bagaimana kualitas dan kuantitas SDM (tenaga pengelola) JKJ?
- Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan JKJ?
- Sumber pembiayaan yang digunakan berasal dari mana saja?
- Menurut anda apakah sistem pembiayaan dilihat dari sumber biaya dan jenis biaya sudah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan JKJ?
- Metode apa yang diterapkan JKJ dalam pelaksanaan kegiatan?

3. PROSES

- Bagaimana sistem perencanaan yang dilakukan Bapel JKJ sebelum pelaksanaan kegiatan?
- Bagaimana pengorganisasian tenaga pengelola dalam mencapai tujuan?
- Bagaimana penggerakkan/pelaksanaan program JKJ?
- Bagaimana pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan JKJ dilaksanakan?

4. OUTPUT

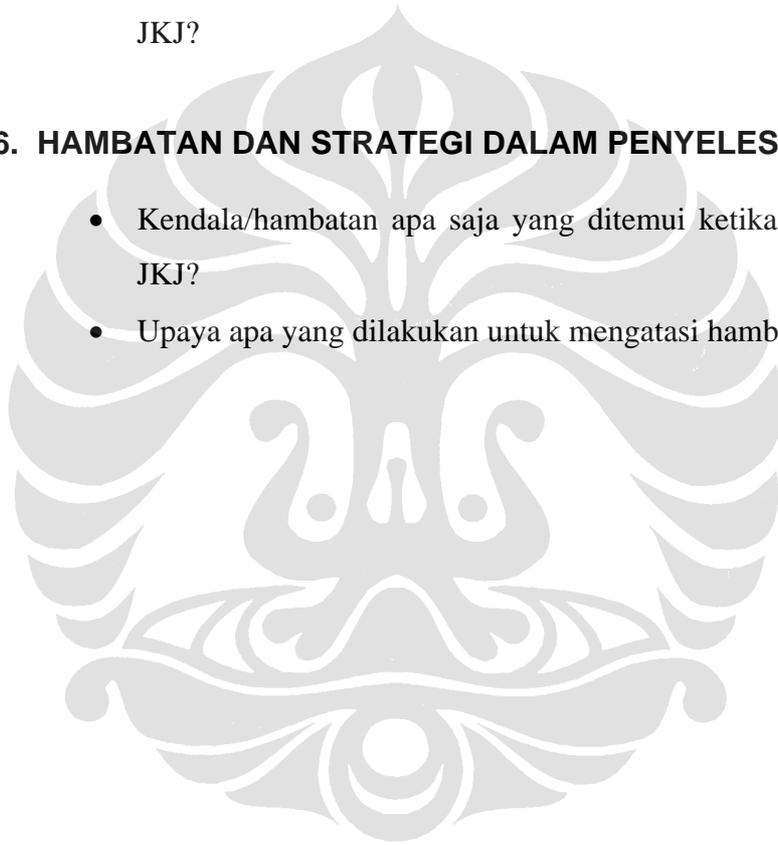
- Bagaimana tingkat kepesertaan penduduk Jembrana sebagai peserta JKJ?
- Bagaimana sistem pembayaran klaim yang dilakukan Bapel kepada PPK?

5. PERAN DIREKTUR JKJ DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN

- Bagaimana peran direktur JKJ dalam penetapan kebijakan pelaksanaan JKJ?

6. HAMBATAN DAN STRATEGI DALAM PENYELESAIAN MASALAH

- Kendala/hambatan apa saja yang ditemui ketika melaksanakan kegiatan JKJ?
- Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?



Lampiran 3

DATA INFORMAN 1

1. Nama : I Gede Santabudi Samba, SKM, M.Kes
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 47 tahun
4. Jabatan : Direktur JKJ
5. Pendidikan akhir : S-2
6. Masa Kerja Golongan : -
7. Masa Kerja Jabatan : 2 tahun
8. Tanggal wawancara : 16 Mei 2008

DATA INFORMAN 2

1. Nama : I Gede Awan Yudiarta, SH
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 37 tahun
4. Jabatan : Kabid Kepesertaan
5. Pendidikan akhir : S-1
6. Masa Kerja : 5 tahun
7. Tanggal wawancara : 26 Mei 2008

DATA INFORMAN 3

1. Nama : I Nyoman Gede Swardana, S.Sos
 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 3. Umur : 47 tahun
 4. Jabatan : Bendahara, Pengeluaran Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana
 5. Pendidikan akhir : S-1
 6. Masa Kerja Golongan : 24 tahun
 7. Masa Kerja Jabatan : 3 tahun
 8. Tanggal wawancara : 26 Mei 2008
- 

Lampiran 4

MATRIKS WAWANCARA MENDALAM

| Pertanyaan | Responden 1 | Responden 2 | Responden 3 |
|---|---|---|--|
| 1. Kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program JKJ? | Dalam pelaksanaan program JKJ kita berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan contohnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik yang tertuang dalam Perda Kabupaten Jembrana No. 7 Tahun 2006, SK Bupati, Instruksi Bupati. Kalau mengenai kebijakan yang dikeluarkan mengenai Tim Persiapan dan Tim Pengelola sebenarnya tugasnya sama hanya saja yang beda adalah anggotanya. Tapi semua tim persiapan otomatis akan menjadi tim pengelola. | Kebijakan yang menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan kegiatan yang terbaru adalah Perda Kabupaten Jembrana No. 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana | Kebijakan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan termasuk keuangan JKJ adalah Kepmendagri No. 13 |
| 2. Siapa yang berpengaruh dalam penetapan kebijakan JKJ? | Dalam penetapan kebijakan secara relevansi kita di JKJ tidak memiliki wewenang. Kebijakan itu dibuat oleh Bupati didasari Perda yang kemudian disetujui oleh pihak legislatif dan eksekutif menjadi suatu kebijakan. Kebijakan ini yang pada nantinya menjadi dasar hukum pelaksanaan. Adanya perda merupakan awal dari suatu kebijakan | Untuk saat ini kita belum diberikan wewenang untuk turut andil dalam penetapan kebijakan. Kebijakan ditetapkan oleh Bupati Jembrana yang disetujui oleh legislatif. | Sampai saat ini yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan itu masih Bupati, kita disini menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan karena kita yakin kalau apa yang telah ditetapkan sudah dipikirkan dengan baik. |
| 3. Pandangan anda mengenai kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan program JKJ | Yang namanya kebijakan itu kan dibuat sesuai dengan daerah kita. Apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan menjadi cikal bakal suatu kebijakan. | Kebijakan yang selama ini digunakan sebagai pedoman saya rasa sudah sesuai dengan keadaan daerah, tapi | Saya rasa kebijakan yang diambil selama ini sudah bagus, namanya juga kebijakan sudah pasti |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>Dalam penentuan kebijakan itu pastinya ada kajian-kajian yang nantinya kalau sudah fix baru menjadi Perda yang dapat diterima semua pihak</p> | <p>sesuai dengan hasil temuan Bawasda ada beberapa hal yang perlu dijabarkan misalnya masalah kewenangan direktur, tanggung jawab direktur dalam pengelolaan keuangan. Kalau masalah lainnya saya rasa sudah cukup dengan perda tersebut. Kami bersama direktur dan instansi terkait sedang mengadakan pertemuan untuk membahas kemana arah JKJ ini akan dibawa kedepannya walaupun perda tersebut sudah cukup baik tapi perlu ada beberapa ketetapan dan SK Bupati untuk mempertegas masalah penjabaran kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan JKJ.</p> | <p>dipikirkan secara matang dan disesuaikan dengan kondisi daerah kita.</p> |
| <p>4. Menurut anda bagaimana kualitas dan kuantitas SDM JKJ saat ini?</p> | <p>Kalau bicara tentang kualitas dan kuantitas itu relative. Kita kan mengarah pada manajemen asuransi tapi kalau SDM yang sesuai dengan itu kita belum. Tapi walaupun demikian program-program kita tetap berjalan karena ada bintek-bintek yang dilakukan baik di tingkat daerah, propinsi maupun tingkat nasional. Mengenai tugas rangkap kita tidak ada yang namanya tugas rangkap karena mengenai tugas pokok fungsi kita sudah ditetapkan dalam Perda jadi yang namanya <i>double job</i></p> | <p>Kualitas SDM saya rasa cukup walaupun perluditingkatkan lagi, tapi kendalanya disini adalah bagian keuangan. Kita belum punya Kabid Keuangan padahal kita harus mengelola keuangan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan itu transparan apalagi dengan dibukanya JKJ Paripurna otomatis kita mengelola uang masyarakat. Selain</p> | <p>Kalau kita bicara masalah kualitas di JKJ memang kurang tetapi melalui pelatihan-pelatihan dan pengalaman saya yakin mereka dapat meningkatkan pemahaman sehingga program tetap bisa berjalan. Apalagi pekerjaan yang dihadapi kan sama jadi kalau melalui pertemuan dan pelatihan saya rasa tidak ada masalah.</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | itu tidak ada. | itu, karena SDM yang tersedia sedikit jadi kita sering kewalahan kalau mau melakukan sosialisasi dan pengawasan kadang-kadang verifikasi klaim menjadi tertunda walaupun ga sampai lama, kadang-kadang kita juga pinjem orang dari gudang maupun Dinkes. | |
| 5. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan JKJ? | Sarana dan prasarana yang kita miliki sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan kita di JKJ, apalagi sekarang kita menggunakan sistem online ditambah lagi dengan J-Net, sehingga dengan J-Net semua pelayanan kita dapat diakses oleh semua PPK. | Sarana dan prasarana yang kita punya sudah sesuai hanya saja untuk kegiatan operasional kendalanya adalah sepeda motor karena kita sering ke lapangan, serta bantuan-bantuan link komputer yang digunakan untuk menunjang sistem online. Selain itu, kendala lainnya seperti line telepon yang masih perlu diperhatikan karena tidak semua PPK terjangkau line telepon yang memadai atau sinyalnya tidak baik terutama di pedesaan sehingga kurang memperlancar komunikasi kita dengan PPK. | Kalau sarana dan prasarana saya rasa sudah cukup. |
| 6. Sumber pembiayaan JKJ bersumber dari mana saja? | Sumber pembiayaan kita hanya bersumber dari APBD | Sumber pembiayaan diambil dari APBD II | Sumber pembiayaannya diambil dari APBD Tahun 2007. |
| 7. Menurut anda, apakah sistem | Iya sudah sesuai karena kita memberikan pelayanan | Semenjak kita berdiri kita tidak mengalami | Kalau keuangannya kan diambil dari |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>pembiayaan dilihat dari sumber dan jenis biaya sudah sesuai dengan kebutuhan?</p> | <p>dasar kepada masyarakat jadi pembiayaan yang disediakan sudah cukup bahkan kita mengalami kelebihan yang kemudian digunakan untuk sumber dana tahun mendatang.</p> | <p>hambatan. Sehingga saya rasa tidak ada masalah dengan pembiayaan kita.</p> | <p>APBD sesuai dengan apa yang direncanakan itu yang direalisasikan per tri wulan, termasuk juga operasional dan pembayaran klaim itu prosesnya mengacu pada kepmendagri 13. Jadi saya rasa sudah sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kalau kita lihat tahun lalu JKJ mengalami surplus dana jadi saya rasa tidak ada masalah.</p> |
| <p>8. Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan?</p> | <p>Dalam melaksanakan kegiatan kita berpedoman pada kebijakan yang sudah disesuaikan dengan kondisi daerah kita yaitu Perda Kabupaten Jembrana No. 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana, selain itu kita juga punya standar terapi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembayaran klaim kepada PPK-1, dimana dalam standar terapi sudah ada daftar penyakit ini, maka obatnya ini, dan jumlah yang diberikan berapa itu semua sudah ada.</p> | <p>Metode yang kita gunakan dalam pembayaran klaim didasarkan pada standar terapi yang disesuaikan dengan penyakit-penyakit yang diderita misalnya penyakit yang diderita ISPA, kita sudah ada standar terapi mengenai obat yang diberikan kepada pasien</p> | <p>Kita dalam pengelolaan keuangan menggunakan metode yang sesuai dengan Kepmendagri No. 13 mengenai pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai akhirnya menjadi DPA baru direalisasikan.</p> |
| <p>9. Bagaimana sistem perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan?</p> | <p>Perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan dibuat oleh JKJ kemudian secara teknis diserahkan ke Dinas Kesehatan. Saya rasa perencanaan selama ini dilakukan sudah sesuai karena program kita hanya</p> | <p>Kalau kita kan dalam melakukan perencanaan menginginkan kepuasan antara masyarakat, PPK, dan Bapel. Dan sampai saat ini, ketiga komponen tersebut</p> | <p>Perencanaan yang dilakukan oleh Bapel JKJ untuk keuangan sama seperti program-program lain dimulai dari penyusunan renja kemudian menjadi</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>2 yaitu upaya pelayanan kesehatan dan pembayaran klaim. Sedangkan Perencanaan anggaran menggunakan perencanaan tahun lalu ditambah 10% dalam perhitungan kita tidak menggunakan angka margin karena hitungan kita jumlah peserta akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga angka utilisasi juga akan meningkat sehingga cost yang kita keluarkan juga semakin besar walaupun dalam praktek pengelolaannya kita menggunakan manajemen efisiensi jadi yang mana bisa dikurangi kita kurangi. Perencanaan yang diajukan selama ini 98 persen diterima karena kita selama ini pelaksanaan kita sudah baik, sehingga anggaran yang kita ajukan diterima. Karena kita didasarkan pada penganggaran yang berbasis kinerja jadi kalau dikurangi nanti kita kekurangan, apalagi orang yang menggunakan fasilitas kesehatan tidak mungkin turun pasti naik. Perencanaan SKPDnya di Dinas Kesehatan tapi usulannya kita yang buat Untuk perencanaan SDM kita belum bisa melakukan karena belum diberikan kewenangan untuk itu, kita hanya bisa melakukan perencanaan operasional. Yang kita <i>include</i> hanya honor untuk operasional saja.</p> | <p>sudah cukup puas dengan apa yang kita lakukan selama ini. Mungkin nantinya perlu dilakukan studi ke daerah lain yang memiliki program sama seperti kita, hanya saja kita sampai saat ini belum menemukan daerah yang kita liat sistem asuransinya lebih bagus.</p> | <p>DPA, nanti realisasinya baru di keuangan. Sebagai umpan baliknya tetap di bagian PEP.</p> |
| <p>10. Bagaimana pengorganisasian tenaga pengelola</p> | <p>Pengorganisasian menggunakan mix PNS dan non PNS jadi kita belum</p> | <p>Kalau kita lihat dari struktur pembagian tugas terus terang kita</p> | <p>Dalam hal pengorganisasian atau pengelolaan</p> |

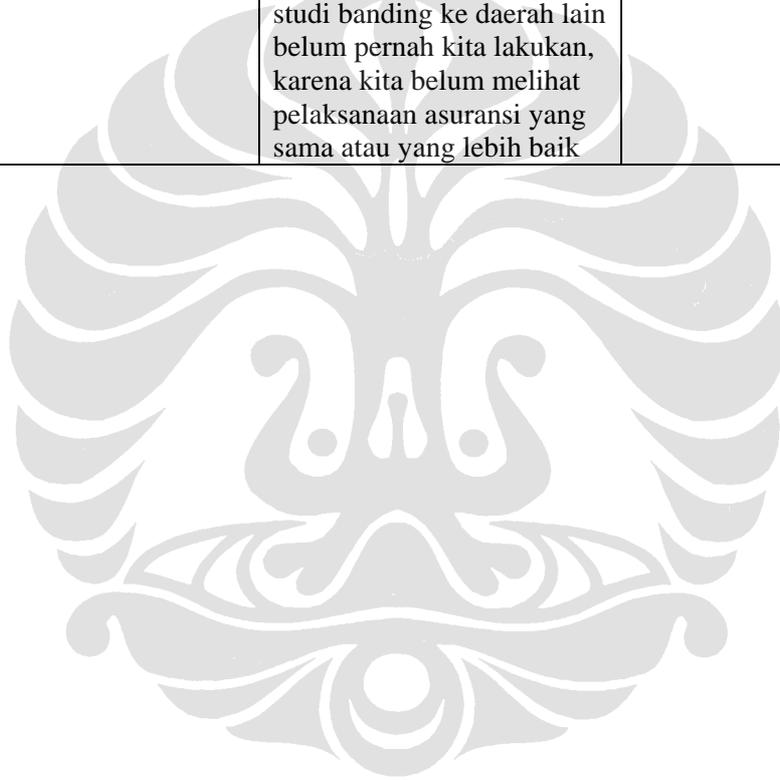
| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>untuk mencapai tujuan?</p> | <p>ada ketentuan karena bentukan lembaga ini masih dalam pengkajian apakah nantinya dibawa kearah BLU. Setelah ada bentukan BLU mungkin baru kita diberikan wewenang untuk itu. Pengorganisasian antara Bapel dengan PPK menggunakan konsep tripartite yaitu antara Bapel, PPK dan masyarakat. Seperti apa yang kita lakukan, karena kita mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sudah dibuatkan contohnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik kita mengacu pada itu. Organisasi kita melakukan suatu kegiatan yang mengacu pada aturan-aturan jadi kiranya tidak banyak yang mengalami permasalahan karena kita melakukan sesuai dengan aturan yang ada mulai dari Perda yang kemudian menjadi Peraturan Bupati, SK Bupati, Intruksi Bupati dan sebagainya. Itu yang menjadi acuan kita. Kalau masalah kualifikasi pendidikan kita belum ada, hanya saja direktur dan Kabid itu minimal harus S-1.</p> | <p>perlu SDM tambahan, selama ini kita kan bisa melihat di bawah direktur ada tiga Kabid, dan masing-masing Kabid memiliki tiga staf. Semestinya, dibawah staf itu adalagi minimal dua staf karena kita juga harus melakukan sosialisasi ke lapangan yang membutuhkan tenaga yang banyak. Makanya kadang-kadang kita pinjem orang dari bagian gudang dan dinas kesehatan untuk membantu kita dalam melakukan sosialisasi.</p> | <p>keuangan, masing-masing SKPD menunjuk PPTK, kalau untuk JKJ yang berfungsi sebagai PPTK adalah Pak Mulyaagus. Beliau yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan apa yang sudah direncanakan kemudian direalisasikan per tri wulan. Apa yang telah direncanakan akan diserahkan kepada kami bagian keuangan, kami nanti yang memproses kalau sudah OK keluarlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).</p> |
| <p>11. Bagaimana penggerakan/pelaksanaan program JKJ?</p> | <p>Mengenai pelaksanaan selama ini tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan yang telah direncanakan. Selama ini juga tidak ada double job, kita mengkhusus untuk melakukan manajemen pelayanan jadi kami tidak ada double job di perangkap jabatan. Kita</p> | <p>Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan, seperti kegiatan sosialisasi dan pengawasan kepada PPK. Hanya saja ketika di lapangan kita masih menemukan adanya moral hazard dari PPK. Berdasarkan instruksi Bupati kalau</p> | <p>Apa yang direncanakan mengenai program itu sudah ada ketentuan yang berlaku. Jadi dalam pelaksanaan tentunya selalu mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat. Kecuali dalam</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>juga tetap melakukan sosialisasi, walaupun tingkat kepesertaan terus meningkat. Kita lakukan sosialisasi melalui perpanjangan informasi di tingkat desa adalah tenaga-tenaga kita di outdoor yaitu di posdayandu. Jadi kita dalam perebutan kepesertaan itu jempot bola</p> | <p>ada PPK yang ketahuan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar terapi, maka kami dapat memutuskan kontrak secara sepihak.</p> | <p>setahun itu apabila ada perubahan, artinya ada anggaran yang berubah dari rencana yang telah diajukan, maka akan menjadi anggaran perubahan, biasanya kalau terjadi perubahan itu pada bulan agustus. Apalagi kalau JKJ terkait dengan pembayaran kiam yang dipengaruhi oleh harga obat yang bisa saja mengalami perubahan, atau karena kenaikan harga BBM.</p> |
| <p>12. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan agar kegiatan sesuai dengan perencanaan?</p> | <p>Secara operasional manajemen kita lewat dewan jamsosda seperti yang tertuang dalam Perda, tapi kalau pengawasan mengenai pelaksanaan pelayanan yang diterima masyarakat kita punya tim utilisasi dan verifikasi. Jadi kita dapat tahu apakah masyarakat sudah diberikan pelayanan yang baik dan apakah dokter sudah memberikan pelayanan yang sesuai dan jika ditemukan suatu pelanggaran misalnya PPK yang memiliki moral tidak baik maka JKJ dapat melakukan pemutusan kontrak.</p> | <p>Pengawasan secara periodik tetap kita lakukan dalam mempertahankan mutu dan kualitas pelayanan melalui tim yang sudah dibentuk Bapel JKJ. Mengingat keterbatasan SDM yang ada, maka kita agak sulit melakukan pengawasan secara rutin, tapi kita pasti melakukan pengawasan tiga bulan sekali baik itu ke dokter maupun bidan.</p> | <p>Pengawasan kita secara rutin lakukan baik itu pengawasan intern maupun ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh Bawasda, sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh BPK. BPK melakukan pengawasan setiap bulan melalui laporan yang kita serahkan. Pada tahun 2007 dilakukan 3 kali pengawasan oleh Bawasda, Propinsi dan BPK.</p> |
| <p>13. Menurut anda, bagaimana tingkat kepesertaan JKJ?</p> | <p>Tingkat kepesertaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan sampai</p> | <p>Tingkat kepesertaan cukup ada peningkatan, Cuma</p> | <p>Kalau yang saya lihat tingkat kepesertaan</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>sekarang tingkat kepesertaan mencapai lebih dari 74 persen dari target kita adalah mencapai 80 persen. Jadi kita kurang 5 persen lagi untuk mencapai target.</p> | <p>peningkatan itu tidak begitu kelihatan karena lima tahun keberadaan kita tidak terlalu drastis peningkatannya, mungkin tahun 2 dan 3 baru kelihatan signifikan peningkatan kepesertaannya. Mungkin sekarang yang terlihat naik dengan signifikan adalah kepesertaan PPK-3 karena program ini program baru.</p> | <p>mengalami peningkatan dari tahun ke tahun</p> |
| <p>14. Bagaimana sistem pembayaran klaim yang dilakukan Bapel kepada PPK?</p> | <p>Pembayaran klaim didasarkan pada system praupaya dan <i>fee for service</i>. Karena kapitasi tidak akan bisa menjamin kepuasan pelanggan karena provider akan bisa berbuat semaunya. Untuk itu kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada masyarakat apalagi dalam kebijakan publik dalam hal ini Pemda berkewajiban memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Karena kita lebih mementingkan kualitas pelayanan maka kita terapkan system pembayaran <i>Fee For Service</i>. Dengan FFS dokter/PPK akan berusaha meningkatkan pelayanan sehingga mendapat pasien lebih banyak. FFS yang diterapkan sesuai dengan ketentuan. Ada 2 substansi yang kita pegang yaitu kendali mutu dan kendali biaya. Oleh karena itu, kita membuat standarisasi sehingga terkendali dalam pembayaran keuangan.</p> | <p>Sistem pembayaran yang dilakukan sudah baik, kita lakukan verifikasi oleh tim verifikasi, tapi tetap kendalanya di tenaga. Apalagi kita tetap harus melakukan sosialisasi di kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana dimana satu tim terdiri dari 2 orang. Terkadang kita pinjem orang di Dinas atau gudang karena keterbatasan tenaga yang ada, sehingga secara otomatis pembayaran klaim menjadi terhambat dan diundur bulan berikutnya tapi pembayarannya ga sampai lama. Kita juga menerapkan system, kalau PPK menyerahkan klaim lewat dari tanggal 10, maka kami akan masukkan ke</p> | <p>Sistem Pembayaran klaim yang dilakukan tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>Karena kita pelayanan dasar maka penyakit, obat, dan biaya sudah ada daftarnya yang selalu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan depkes. Apalagi program ini merupakan kebijakan publik dalam hal ini dilakukan oleh Pemda yang berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas.</p> | <p>pembayaran bulan berikutnya</p> | |
| <p>15. Bagaimana peran direktur JKJ dalam penetapan kebijakan?</p> | <p>Sesuai dengan tupoksi ada hal-hal yang sudah diwenangkan dan ada hal-hal yang menjadi pertimbangan pihak atas dalam hal ini Bupati. Hal-hal yang menjadi wewenang kami disini antara lain pemutusan kontrak, melakukan perubahan harga obat yang mengacu pada Permenkes yang baru.</p> | <p>Sampai saat ini direktur memiliki wewenang untuk memutus secara sepihak apabila ditemukan PPK yang <i>moral hazard</i>. Tetapi untuk kedepannya, sesuai dengan temuan Bawasda perlu dijabarkan lebih jelas masalah kewenangan direktur dan tanggung jawab direktur dalam pengelolaan keuangan.</p> | - |
| <p>16. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan?</p> | <p>Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah resources. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dirasa masih kurang karena mekanisme kita adalah jemput bola jadi perlu tenaga banyak. Dari segi kualitas, kita belum ada tenaga yang mengerti tentang pemasaran. Selain itu, untuk mempermudah Sistem Informasi dan modernisasi diperlukan tenaga IT, tetapi saat ini kita belum punya begitu juga dengan sarananya masih kurang memadai. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang berkualitas.</p> | <p>Seperti yang saya katakana tadi bahwa kita masih mengalami hambatan dalam hal jumlah tenaga yang masih kurang kita juga mengalami hambatan kurangnya mobilitas kita ke lapangan seperti ketersediaan sepeda motor. Selain itu ketersediaan line telepon yang memadai dalam rangka mendukung sistem online masih perlu diperhatikan.</p> | <p>Sesuai dengan Kepmendagri No. 13 memang kita sebagai pegawai mengalami kesulitan apalagi ini termasuk program baru sehingga kita harus menyesuaikan diri dan belajar agar kita bisa menjalankan program ini dengan baik.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>17. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?</p> | <p>Kita sudah mengajukan usulan berupa <i>resources</i> dan sarana yang kurang memadai. Selain itu, kita juga sudah berusaha untuk meningkatkan pemahaman SDM kita melalui Bintek yang kita lakukan, memberikan referensi-referensi mengenai asuransi, dan pengiriman tenaga ke pusat seperti Depkes. Kalau mengenai studi banding ke daerah lain belum pernah kita lakukan, karena kita belum melihat pelaksanaan asuransi yang sama atau yang lebih baik</p> | <p>Kita sudah melakukan uaya seperti mengusulkan ke bagian kepegawaian mengenai masalah ketenagaan yang bekerja di JKJ.</p> | <p>Kita selalu melakukan pertemuan untuk meningkatkan tingkat pemahaman kita mengenai program ini. Dengan dilakukannya pertemuan-pertemuan ini akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa jalan.</p> |
|---|--|---|---|



Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH

Sekretariat : Jln. Mayor Sugianyar No.7 Negara

Telpon (0365) 41803

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH (JAMSOSDA)
DENGAN
PRAKTEK DOKTER UMUM SWASTA SELAKU PPK 1
TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMSOSDA DI
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 091/SPK-D/BPJSD/2008

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan mei tahun dua ribu delapan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **I GEDE SANTABUDI SAMBA SKM, M.Kes**
NIP : 140 121 926
Jabatan : Direktur Bapel Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jemberana.
ALAMAT : Jalan Mayor Sugianyar Nomor 7, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **dr. A.A.NGURAH MADE AVATARA SADHAKA**
PEKERJAAN : Dokter Umum Praktek Swasta
NO. IJIN PRAKTEK : 503/032/D.24/Kes/Yanum/2008.
ALAMAT : Dsn. Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jemberana.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka upaya pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jamsosda maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

DASAR DAN PERJANJIAN

Pasal 1

Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 31 tahun 2003 Tentang Pengalihan subsidi Pelayanan Kesehatan dan Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Jembrana (Bapel JKJ) tanggal 24 Januari 2003.
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Bapel JKJ dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Nomor : 445/273/Dinkes. Tanggal 30 Januari 2003. Nomor : 001/SPK/JKJ/2003
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA sebagai Badan Penyelenggara Jamsosda berkewajiban menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bagi peserta Jamsosda dan memberikan tanda pengenal kepada peserta Jamsosda.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar klaim kepada PIHAK KEDUA, apabila klaim sudah disetorkan dan diverifikasi serta kelengkapan administrasinya telah dipenuhi dengan benar.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar klaim apabila nama yang diklaim benar - benar sebagai penderita (sesuai dengan hasil pemeriksaan dan Diagnostik).
4. PIHAK PERTAMA tidak menerima klaim dari PIHAK KEDUA dan jasa biaya pemeriksaan / pengobatan pada pasien yang sama dengan diagnose sama berturut – turut setiap hari setelah hari ke 5 (lima).
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban memantau pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA agar terlaksana secara efisien dan efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamsosda dalam wilayah kerjanya sesuai standar pelayanan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban bekerja secara profesional dan tidak melanggar kode etik atau pemeriksaan diagnostik dan penentuan therapy harus benar – benar rasional.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pencatatan pelayanan dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajukan klaim ke Bapel Jamsosda setiap awal bulan pada bulan berikutnya sebelum tanggal 5 (lima) sesuai dengan jenis pelayanan.

KEPESERTAAN JAMSOSDA

Pasal 4

Peserta Jamsosda adalah masyarakat Kabupaten Jembrana yang dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

- a. Masyarakat Pegawai Negeri Sipil
- b. Masyarakat Pegawai Swasta
- c. Masyarakat Umum
- d. Masyarakat Miskin.

Peserta Jamsosda memperoleh tanda pengenal berupa kartu peserta Jamsosda atau tanda pengenal lainnya.

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PPK 1)

Meliputi pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. Rawat jalan tingkat pertama pada praktek Dokter umum Swasta (PPK 1) yang terikat kontrak kerja dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Bapel Jamsosda). Adapun pelayanan yang diberikan meliputi : penyuluhan kesehatan (Promotif), pencegahan (preventif),

serta penyembuhan dan pengobatan terhadap penyakit (kuratif) Untuk Kasus penyakit yang sama, orang yang sama rentang waktu berobat ditanggung setelah 5 (lima) hari kecuali dengan kasus penyakit / diagnosa yang berbeda dan menunjukkan kartu peserta Jamsosda yang sah dan masih berlaku serta buku berobat.

b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) besaran klaim yang akan dibayar oleh Bapel Jamsosda sebesar maksimal Rp.27.000,- (Dua puluh tujuh ribu rupiah), sudah termasuk jasa medis Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah), obat-obatan maksimal Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) dengan menggunakan obat-obatan sesuai dengan standar terapy yang ditetapkan oleh Bapel Jaminan Sosial Daerah dan harga obat yang dibayar sesuai dengan harga obat yang telah ditetapkan oleh Bapel Jamsosda. Untuk pemeriksaan dan pengobatan ibu hamil (ANC) dan Keluarga Berencana hanya dilayani oleh Bidan sebagai PPK1.

c. Pelayanan bedah minor oleh Praktek Dokter Swasta (PPK 1) tidak diperbolehkan menarik biaya tambahan.

d. Terhadap kasus tersebut diatas (point b dan c) yang tidak dapat ditangani oleh PPK 1 dapat dirujuk ke RSUD Negara, sebagai PPK 2 dan PPK 3 dirawat dikelas III untuk peserta Gakin dan JKJ Paripurna di kelas II..

Pembiayaan pelayanan tersebut diatas yang telah disubsidi oleh Pemkab Jembrana melalui Bapel Jamsosda tidak diperkenankan lagi menarik biaya tambahan dari masyarakat peserta Jamsosda.

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA melaksanakan pencatatan tentang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamsosda.
2. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang data kunjungan peserta Jamsosda dan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA dengan menggunakan on line system.
3. PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan pemantauan dan monitoring terhadap pelayanan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak secara sepihak, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan/melanggar ketentuan yang berlaku.

WAKTU

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 14 Mei 2009 dan dapat diperpanjang.

HAL – HAL LAIN

Pasal 8

1. Perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian ini, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dan apabila mufakat tidak dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Negara untuk menyelesaikannya.

3. Selama proses penyelesaian musyawarah untuk mufakat atau melalui proses peradilan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa peserta Jamsosda tetap memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.

Demikian surat perjanjian kerja (kontrak) ini dibuat yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

dr.A.A.NGR.MD.AVATARA S.I Gede Santabudi Samba SKM,M.Kes

Nip. 140 121 926

Lampiran 7

**DAFTAR : NAMA-NAMA PPK-1 DOKTER YANG MENGIKAT KONTRAK
DENGAN BAPEL.JAMINAN SOSIAL DAERAH KAB.JEMBRANA
TAHUN 2007**

| NO | N A M A | NOMOR KONTRAK | ALAMAT |
|----------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | KECAMATAN NEGARA | | |
| 1 | dr. I Ketut Naba | 001/SPK-D/JKJ/2007 | Jln. Plawa No.39 Negara. |
| 2 | dr. I Gst.Ngr.Wikanadi,KP. | 003/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Pulau Irian, No,40, Dauhwaru |
| 3 | dr. I Nyoman Dangan Gunaya | 004/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Jend.Sudirman, No.11, Negara |
| 4 | dr. I Dewa Gede Sidan Ardana | 007/SPK-D/JKJ/2007 | Rumah Dinas Pusk.D.T.Aya |
| 5 | dr. Putu Suasta,M.Kes | 008/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Nusa Indah Raya, No.12. |
| 6 | dr. I Made Sudaarsana,M.Kes | 009/SPK-D/JKJ/2007 | Link.Sri Mandala, Kel.Dauhwaru |
| 7 | dr. I Nyoman Sumartha | 011/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Jend.Sudirman, No.19, Negara |
| 8 | dr. I Ketut Darmawan | 013/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Arjuna, No.5 Negara. |
| 9 | dr. Ni Putu Eka Indrawati | 034/SPK-D/JKJ/2007 | Rumah Dinas Pusk.Pengambangan |
| 10 | dr. Sri Sutarsih Saidi | 017/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Pengambangan, Kec.Negara |
| 11 | dr. I Made Dwipayana | 021/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Danau Beratan, No.75,Negara |
| 12 | dr. Antony Purnama | 022/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Pahlawan I/28, Negara |
| 13 | dr. Yenni Hariani | 025/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn.Anyar, Ds.Batuagung, Kec. Negara |
| 14 | dr. I Gst.A.A.Oka Ariyani | 026/SPK-D/JKJ/2007 | Link.Terusan, Kel.Loloan Barat |
| 15 | dr. Silvia Andriani Susila | 027/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Pengambangan, Kec.Negara |
| 16 | dr. Putu Agung Budiasih | 029/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.G.Agung, Gang III/I, Negara |
| 17 | dr. Widjaja Setiabudi | 030/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Gatot Subroto No.20, Negara |
| 18 | dr. I Made Utama | 031/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Ngurah Rai No.30, Negara |

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|--|
| 19 | dr. Ida Megawati | 035/SPK-D/JKJ/2007 | Dusun Banyubiru , Desa Kaliakah |
| 20 | dr. I Gst.Bgs.Kt.Oka Parwata | 038/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Danau Buyan I/7, Negara |
| 21 | dr. Handoko Santoso | 038/SPK-D/JKJ/2006 | Jln.Salya Ni 10 Banjar Tengah |
| 22 | dr. Hertih | 042/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Merpati No.19, Kel. Pendem |
| 23 | dr. Ni Made Dwi Diantari | 044/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Arjuna, No.5 Negara. |
| 24 | dr. Ni Ketut Wiratni | 047/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Baluk II, Desa Baluk. |
| 25 | dr. Ni Nyoman Erniyawati | 068/SPK-D/JKJ/2007 | Link. Ketapang, Kel. Lelateng |
| 26 | dr. I Kadek Juniartha Adiyasa | 072/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Pebuahan, Ds.Banyubiru |
| 27 | dr. Ni Putu Dewi Sri Wahyuni | 070/SPK-D/JKJ/2007 | Link.Pangkung Gondang,Sangkaragung |
| 28 | dr. I Nyoman Widia | 079/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Cupel, Kec. Negara |
| 29 | dr. I Putu Agus Setiabudi | 083/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Tegal Badeng Timur, Negara |
| 30 | dr. Anica Hadi | 085/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Cupel, Kec. Negara. |
| 31 | dr. Ni L.Putu Intan Kartika C.D | 089/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Rening, Desa Baluk |
| 32 | dr. Nurjanah Handayani | 094/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Puana, Desa T.B.Barat. |
| 33 | dr. Luh Wayan Sriadi | 095/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Cendrawasih No.3, Pendem |
| 34 | dr. Ni Made Gita Indrayanthi | 096/SPK-D/JKJ/2007 | Jln. Kepundung No.9, Loloan Barat |
| 35 | dr. Mustika Kurniawati | 037/SPK-D/JKJ/2007 | Rumah Dinas PPP Yeh Kuning |
| 36 | dr, Nyoman Satya | 103/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Nusa Indah Raya No 68 Kel. B.B. Agung |
| II | KECAMATAN MENDOYO | | |
| 37 | dr. Kade Sri Indrawati | 084/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Yeh Embang Kangin, Mendoyo |
| 38 | dr. I Nyoman Susila, M.Kes. | 002/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Munduk, Ds.Pohsanten |
| 39 | dr. I Putu Suekantara | 005/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Pasar, Ds.Yehembang. |
| 40 | dr. I Ketut Sangka Budyasa | 016/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn.Munduk, Desa Pohsanten |
| 41 | dr. I Made Dudy Rahardy | 024/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn.Kebebeng, Ds.Mendoyo Dh.Tukad |

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------------------|--|
| 42 | dr. A.A.Ketut Oka Sedana | 032/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn.Pasar, Desa Yehembang |
| 43 | dr. I Gst.A.Laksmi Damayanti | 036/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Pergung, Kec, Mendoyo |
| 44 | dr. Ni Kadek Dian Lestari | 060/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo |
| 45 | dr. Ni Nyoman Wiwiek Yuliadewi | 074/SPK-D/JKJ/2007 | Rumah Dinas Pusk. Mendoyo |
| 46 | dr. Ni Luh Putu Maharani | 086/SPK-D/JKJ/2007 | Ds. Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo |
| 47 | dr. I Gst.Bagus Indra Prinatha | 087/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Mendoyo Dauh Tukad |
| 48 | dr. A.A.Ngr.Md.Avatara S. | 091/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Yeh Sumbul |
| 49 | dr. I Putu Agus Gautama | 055/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Anyar Tengah, Ds.Penyaringan. |
| 50 | dr. I Gede Wiadnyana | 041/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Anyar Kelod, Desa Penyaringan. |
| III | KECAMATAN MELAYA | | |
| 51 | dr. I Ketut Budi Sadputra. | 006/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Melaya, Kec. Melaya. |
| 52 | dr. I Wayan Rasmen Adikusuma | 018/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Sukoto, No.4, Melaya |
| 53 | dr. Ni Putu Mirah Lidyawati | 053/SPK-D/JKJ/2007 | Jln.Pelopor, Desa Blimbingsari, Melaya |
| 54 | dr. Ni Made Budi Kusumawati | 056/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn.Sumpersari, Desa Melaya. |
| 55 | dr. I Kadek Riadi Wiranuaba | 097/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Anyarsari, Ds. Nusasari |
| 56 | dr. Ni Luh Putu Suartini | 020/SPK-D/JKJ/2007 | Dusun Melaya , Desa Melaya |
| 57 | dr. Kadek Dewi Damayanti | 098/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn.Munduk Ranti,Desa Manistutu |
| 58 | dr. Elo Succianti Subianto | 100/SPK-D/JKJ/2007 | BKIA Purna Giri,Dsn.Palasar |
| 59 | dr. Km.Rai Widya Astika | 101/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn.Candikusuma,Desa Melaya |
| 60 | dr. Yoan Anis Setyowati | 102/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Tuwed, Kecamatan Melaya |
| IV | KECAMATAN PEKUTATAN | | |
| 61 | dr. Nengah Ariani | 023/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn.Pasar, Desa Gumbrih. |
| 62 | dr. I Gede Suma | 062/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Pulukan, Kec. Pekutatan. |
| 63 | dr. I Nyoman Widia | 079/SPK-D/JKJ/2007 | Desa Pengeragoan, Kec. Pekutatan. |

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| 64 | dr. I Gede Ambara Putra | 014/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn.Pasar, Ds.Pekutatan. |
| 65 | dr. Putu Nur Idayanti | 061/SPK-D/JKJ/2007 | Dsn. Temukus ,Desa Asahduren |
| DAFTAR : NAMA-NAMA PPK-1 DOKTER GIGI YANG MENGIKAT KONTRAK DENGAN BAPEL.JAMINAN SOSIAL DAERAH KAB.JEMBRANA TAHUN 2007 | | | |

| NO | N A M A | NOMOR KONTRAK | ALAMAT |
|-----------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | KECAMATAN NEGARA | | |
| 1 | drg. Ni Wayan Rustiati | 001/SPK-DRG/JKJ/2007 | Jln.P.Komodo No.11, Dauhwaru |
| 2 | drg. Hairatin | 002/SPK-DRG/JKJ/2007 | Link. Ketugtug, Kel.Loloan Timur. |
| 3 | drg. Ni Nengah Suryani | 003/SPK-DRG/JKJ/2007 | Jln. Gatot Subroto No. 14, Negara. |
| 4 | drg. Wachida Hesti Utami | 004/SPK-DRG/JKJ/2007 | Jln. Danau Kalimutu No.11, Negara |
| 5 | drg. Ni Wayan Winarsih | 007/SPK-DRG/JKJ/2007 | Link. Kebon, Kel. B.B.Agung |
| 6 | drg. I Made Mahartayasa | 009/SPK-DRG/JKJ/2007 | Jln. Gajah Mada No. 34, Sebuat |
| II | KECAMATAN MENDOYO | | |
| 7 | drg. Bambang Sridadi. | 006/SPK-DRG/JKJ/2007 | Dsn. Dauh Pasar, Desa Pergung |
| 8 | drg. I Wayan Widiarsana | 008/SPK-DRG/JKJ/2007 | Desa Mendoyo Dauh Tukad. |

**DAFTAR : Nama-nama PPK1 Bidan yang mengikat Kontrak
dengan Bapel Jaminan Kesehatan Jembrana
Tahun 2007**

| NO | N A M A | NOMOR KONTRAK | ALAMAT |
|----------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | KECAMATAN NEGARA | | |
| 1 | I Gst.Ngurah Md.Dwi Irawati | 001/SPK-B/JKJ/2007 | Jln. Jalak Putih No.9, Pendem |

| | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 2 | Ni Ketut Rintiasih | 002/SPK-B/JKJ/2007 | Jln.Gn.Semeru III/15A, Negara |
| 3 | Ni Nyoman Budiasih | 008/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Baluk, Kec. Negara. |
| 4 | Ni Kade Wardani | 012/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Dangin Tukadaya |
| 5 | Ni Made Suasni | 015/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Air Anakan, Desa Banyubiru |
| 6 | Ni Ketut Purnamasari | 018/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Budeng, Ds.Budeng, Negara |
| 7 | Ni Made Sulianti | 021/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Tegal Cantel, Ds. Yeh Kuning |
| 8 | Ni Made Bakti | 022/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Perancak, Negara |
| 9 | Setyaningsih | 023/SPK-B/JKJ/2007 | Jln. Gn.Batur No.4A, Negara |
| 10 | Ni Wayan Widiastri | 024/SPK-B/JKJ/2007 | JLn. Satria No.60, Pendem |
| 11 | Y u h a | 025/SPK-B/JKJ/2007 | JLn. Kedondong No.3, Negara |
| 12 | Ni Komang Suci Prastikawati | 026/SPK-B/JKJ/2007 | Link. Menega, Kel. Dauhwaru |
| 13 | Ni Ketut Soni | 027/SPK-B/JKJ/2007 | Jln. P.Buru, Lingk.Pemedilan |
| 14 | Ni Gst.A.Komang Wirawati | 028/SPK-B/JKJ/2007 | Lingk.Dauhwaru, Kec. Negara |
| 15 | Ni Ketut Sawitri Ariyani | 029/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Berangbang, Kec. Negara |
| 16 | Ni Wayan Sarni | 030/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Cupel, Kec. Negara |
| 17 | Ni Luh Artoni | 031/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Kaliakah, Kec. Negara |
| 18 | Ni Nyoman Wirawati | 032/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Kaliakah Kec. Negara |
| 19 | Rukmiati | 031/SPK-B/JKJ/2007 | Jln,Ngurah No 16 Negara |
| 20 | Ni Wayan Listyawati | 032/SPK-B/JKJ/2007 | Jl. Nusa Indah Raya No 35 BB.Agung |
| 21 | Ni Luh Suciati | 038/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Manistutu, Melaya |
| 22 | Sri Suharni | 040/SPK-B/JKJ/2007 | Kel. Lelateng , Negara |
| 23 | Ni Wayan Indrakasih | 041/SPK-B/JKJ/2007 | Link. Keladian, Kel.Dauhwaru |
| 24 | Ni Made Dwi Antarini | 043/SPK-B/JKJ/2007 | Jln. Jempiring No.33, B.B.Agung |
| 25 | Maria P.Ximenes Pereira | 046/SPK-B/JKJ/2007 | Link.Sawe Rangsa, Link.Dauhwaru |

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26 | Ni Luh Made Asmariani | 047/SPK-B/JKJ/2007 | Jln.Danau Ranau Gg.III, No.14 |
| 27 | Ni Ketut Sulistiani | 057/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Perancak, Kec. Negara |
| 28 | Ni Ketut Murdani | 061/SPK-B/JKJ/2007 | Kel. Dauhwaru, Kec. Negara |
| 29 | Ni Nengah Dewi Astiti | 062/SPK-B/JKJ/2007 | Kel. Lelateng, Kec. Negara |
| 30 | Ni Ketut Artini | 063/SPK-B/JKJ/2007 | Lingk. Sawe, Kel. Dauhwaru |
| 31 | Blandina S. Meman | 070/SPK-B/JKJ/2007 | Kel. Lelateng, Kec. Negara |
| 32 | Ramida P. | 075/SPK-B/JKJ/2007 | Jln.P.Menjanggan, Kel.Dauhwaru |
| 33 | Ni Luh Gde Rsi Arini | 076/SPK-B/JKJ/2007 | Kel. Sangkaragung, Kec. Negara |
| 34 | Ni Nyoman Suderni | 081/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Tengah, Ds.Tegal Badeng Barat |
| 35 | Widjajati | 082/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Pangkung Buluh, Ds.Kalihak |
| 36 | Ni Luh Ketut Bodi Adnyani | 093/SPK-B/JKJ/2007 | Jln.Danau Beratan, Kel. Lelateng |
| 37 | Ni Putu Olivia Yoanita | 094/SPK-B/JKJ/2007 | Kel. Sangkaragung, Kec. Negara |
| 38 | Siti Djuwariah | 095/SPK-B/JKJ/2007 | Lingk. Tinyeb, Kelurahan Br. Tengah |
| 39 | Sayu Ketut Sudiarti | 097/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Berangbang, Kec. Negara |
| 40 | Ni Nyoman Wiastuti | 104/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Sawe, Desa Batu Agung |
| 41 | Ni Ketut Tini Ernawati | 105/SPK-B/JKJ/2007 | Link. Menega, Kel. Dauhwaru |
| 42 | Rusmawati | 110/SPK-B/JKJ/2007 | Dusun Tengah, Desa T.B.Barat. |
| 43 | Ni Ketut Budi Sastrini | 114/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara |
| 44 | Sulistiyani Veronika | 115/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Banyubiru, Kec. Negara |
| 45 | I Gst. Ayu Juni Anatari | 116/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Kaliakah, Kec. Negara |
| 46 | Ni Luh Putu Aryawati | 118/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Pebuahan, Desa Banyubiru |
| 47 | Ni Putu Ekawati | 119/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Baluk II, Desa Baluk |
| 48 | Febrina Dwita Ayu Sri H. | 120/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Kelapa Balian, Ds. Pengambangan |

| | | | |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 49 | Anisa Surya | 121/SPK-B/JKJ/2007 | Jln. Durian No.16, Kel. Loloan Barat |
| 50 | CH. Sriyani | 122/SPK-B/JKJ/2007 | Kelurahan Lelateng, Kec. Negara |
| 51 | Ni Luh Juniati | 034/SPK-B/JKJ/2007 | Link. Keladian, Kel.Dauhwaru |
| 52 | Ni Ketut Wirasmini | 036/SPK-B/JKJ/2007 | JLn. Ngurah Rai N0.16, Negara |
| 53 | Ni Nyoman Yasa | 035/SPK-B/JKJ/2007 | Lingk Pendem, Kel. Pendem |
| 54 | Ni Komang Ayu Sri Wahyuni | 092/SPK-B/JKJ/2007 | Link.Dewasan ,Kel.Pendem |
| 55 | I Gst.Ayu Juniantari | 116/SPK-B/JKJ/2006 | Link.Dewasan ,Kel.Pendem |
| 56 | Ni Wayan Indrakasih | 041/SPK-B/JKJ/2007 | Jln.Nusa Indah Raya No.35. |
| 57 | Sayu Ketut Sudiarti | 097/SPK-B/JKJ/2006 | Desa Berangbang , Kec.Melaya |
| 58 | Merita Esperanca Dacosta | 107/SPK-B/JKJ/2007 | Lingk. Kebon,Kel.B.B.Agung |
| 59 | Ni Nengah Sekarwati | 108/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Batu Agung , Negara |
| 60 | Gusti Ayu Rastiti | 033/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Berangbang, Negara |
| 61 | Ni Made Dwi Yuliantini | 123/SPK-B/JKJ/2007 | Kel. B.B. Agung , Negara |
| 62 | Ni Luh Wirandani | 125/SPK-B/JKJ/2007 | Kel. Pendem , Negara |
| 63 | Ni Luh Pt.Nensi Sudantra | 126/SPK-B/JKJ/2007 | Jln. P.Irian No 72 Negara |
| 64 | Ni Nengah Budiani | 127/SPK-B/JKJ/2007 | Link.Sawe ,Kel. Dauhwaru |
| 65 | Ni Luh Nova Indrayani | 128/SPK-B/JKJ/2007 | Jl. Kutilang No 7 Satria |
| 66 | Ni Kayan Wiantri | 129/SPK-B/JKJ/2007 | Ds.Dangin Tukadaya, Negara |
| 67 | Ni Luh Suseni | 128/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn Sebul , Ds.Dangin Tukadaya |
| II | KECAMATAN MENDOYO | | |
| 68 | Ni Putu Kasihati | 003/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Munduk, Desa Pohsanten |
| 69 | I Wayan Kusmiati | 004/SPK-B/JKJ/2007 | Ds.Tegalcangkring, Kec.Mendoyo |
| 70 | Ni Luh Putu Sukasih | 006/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn.B.B.Agung, Ds.Yehembang. |
| 71 | Ni Komang Ayu Yuliari | 009/SPK-B/JKJ/2007 | Ds.Mendoyo Dauh Tukad |

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------|---|
| 72 | Ni Luh Muliastri | 010/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Munduk, Desa Pohsanten |
| 73 | Ni Ketut Murdi | 013/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo |
| 74 | Ni Komang Parwati | 020/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Wali, Desa Yehembang |
| 75 | Ni Ketut Sumari | 060/SPK-B/JKJ/2007 | Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo |
| 76 | Gst.Ayu Komang Sutiastari | 064/SPK-B/JKJ/2007 | Ds. Dlodberawah, Kec. Mendoyo |
| 77 | Gst.A.Pt.Suastuti Utami | 067/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Tegal Gede, Desa Yehembang |
| 78 | NI Nyoman Eliani | 069/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo |
| 79 | Ni Ketut Semiwerthi K. | 072/SPK-B/JKJ/2007 | Ds. Yehembang, Kec. Mendoyo |
| 80 | Ni Putu Sumiarti | 079/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Yehembang, Kec. Mendoyo |
| 81 | Ida Ayu Ketut Ariati | 080/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Yehembang, Kec. Mendoyo |
| 82 | Ni Ketut Andiyani | 083/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Kaleran, Ds. Yehembang |
| 83 | Ni Made Nitri Purwanti | 088/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Tibusambi, Ds.Penyaringan |
| 84 | Ni Putu Asrini | 091/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Mendoyo Dangin Tukad |
| 85 | Ni Made Sepren | 096/SPK-B/JKJ/2007 | Desa. Penyaringan, Kec. Mendoyo |
| 86 | Ni Komang Hendrawati | 098/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Tegak Gede, Ds. Yehembang |
| 87 | Luh Pt. Sri Widiastuti | 099/SPK-B/JKJ/2007 | Jln. Rama, Ds. Mendoyo Dauh Tukad |
| 88 | Ni Putu Sukanadi | 117/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Tibubeleng Tengah, Ds.Penyaringan |
| 89 | Ni Ketut Warsini | 044/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Munduk ,Mendoyo |
| 90 | Ni Made Poedji Astuti | 045/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Tegal Cangkring |
| 91 | Ni Luh Putu Suadi | 058/SPK-B/JKJ/2007 | Ds. Yehembang Kangin, |
| 92 | Ni Made Nitri Purwanti | 088/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Tibusambi, Ds.Penyaringan |

| | | | |
|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| III | KECAMATAN MELAYA | | |
| 93 | Ni Luh Suciati | 038/SPK-B/JKJ/2005 | Desa Manistutu , Melaya |
| 94 | Ni Putu Resimawati | 033/SPK-B/JKJ/2007 | Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya |

| | | | |
|-----------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 95 | Siti Hasanah | 030/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Manistutu , Kec. Melaya |
| 96 | Ni Kadek Reni | 037/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Tukadaya, Kec. Melaya |
| 97 | Ni Wayan Sriasih | 086/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Moding, Desa Candikusuma |
| 98 | Yulita Lusya Trombone | 087/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Moding, Desa Candikusuma |
| 99 | Ni Wayan Sirka | 089/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Ekasari, Kec. Melaya |
| 100 | Tri Setyo Wahyuni | 100/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Palasari, Ds. Ekasari, Melaya |
| 101 | Ni Made Dwi Kartikawati | 101/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Munduk Bayur, Desa Tuwed |
| 102 | Ni Ketut Sutami | 106/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Sumbersari, Kec. Melaya |
| 103 | Ni Wayan Bandawati | 109/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Warnasari Kaja, Warnasari |
| 104 | Yeni Kodi Nanga | 113/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Candikuduma, Kec. Melaya |
| 105 | I Gst. Agung Ayu Manik | 005/SPK-B/JKJ/2006 | Link. Asih, Kel. Gilimanuk |
| 106 | Tri Retno Udayani | 048/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Manistutu , Melaya |
| 107 | Katmini | 124/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn Sumber sari ,Desa Melaya |
| 108 | Ni Luh Santika Ary H. | 130/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Munduk Bayur, Desa Tuwed |
| 109 | Suwartiningsih | 042/SPK-B/JKJ/2007 | Jln. Satri No.57, Kel. Pendem |
| IV | KECAMATAN PEKUTATAN | | |
| 110 | Ni Ketut Murni | 007/SPK-B/JKJ/2007 | Ds. Pekutatan. Kec. Pekutatan |
| 111 | I Gst. Ayu Putu Aryani | 059/SPK-B/JKJ/2007 | Ds. Pangyangan, Kec. Pekutatan |
| 112 | Ni Made Sumadi | 073/SPK-B/JKJ/2007 | Desa Gumbrih, Kec. Pekutatan |
| 113 | Ni Made Sujiwati | 078/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Pasar, Desa Gumbrih |
| 114 | Unik ES Purwanti | 111/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Manggissari, Ds. Manggissari |
| 115 | Ni Luh Kt. Suryati | 103/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Asah Duren, Ds. Asahduren |
| 116 | Gst. Ayu Putu Yudianti | 112/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Arca , Desa Pulukan |
| 117 | Ida Ayu Susilawati | 011/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn. Bading Kayu, Ds. Pengeragoan |

| | | | |
|-----|--------------|--------------------|----------------------------|
| 118 | Siti Hasanah | 030/SPK-B/JKJ/2007 | Dsn.Pasar , Desa Pekutatan |
| | | | |



Lampiran 8

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NERACA
PER : JANUARI 2007 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2007**

| NO | PENERIMAAN | RUPIAH | NO | PENGELUARAN | RUPIAH | SELISIH |
|----|---|---|----|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Terima Saldo Kas Jamsosda Th.2007 Operasional 1. Pendaftaran Peserta JKJ. PPK.1 (BARU) | 1.451.259.235,41 - | I | Operasional 1. Pendaftaran Peserta JKJ. PPK.1 (BARU) | 0 | - |
| | JUMLAH | - | | JUMLAH | - | - |
| | 3. Obat-obatan : | | | 3. pengeluaran terdiri dari : | | |
| | - JKJ | 495.053.955,06 | | a.Pengadaan blanko SBBK obat b.Panjar pengadaan kartu Jamsosda PPK-1 % PPK-3 | 462.500,00 170.000.000,00 | |
| | JUMLAH | 495.053.955,06 | | JUMLAH | 170.462.500,00 | 324.591.455,06 |
| II | Non Operasional (APBD + BUNGA BANK) 1.Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Premi) JKJ /Bantuan Bupati Jembrana 2. Jasa giro bln. Januari s/d.Desember 2007 3. Pengembalian panjar pengadaan kartu JKJ PPK-1 | 7.326.000.000,00 32.238.403,75 246.000.000,00 | II | Non Operasional (APBD + BUNGA BANK) 1.Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Perorangan (klaim PPK-1) JKJ /Bantuan Bupati Jembrana - Pembayaran klaim umum -Pemby.Klaim obat Gakin - Pemby.klaim ASKES 2. Sosialisasi JKJ: a.Biaya Transport / BBM. Keg.JPK Gakin b.Biaya Transport dan konsumsi ptgs. c. Biaya sosialisasi promosi dan seminar 3.Biaya pengawasan / Pemantauan PPK | 6.472.870.958,00 189.841.761,00 566.328.294,00 - - - 8.992.000,00 | |
| | 4.Biaya pengawasan / Pemantauan PPK | 8.992.000,00 | | 5.Biaya Administrasi : a. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Bapel.Jamsosda b. Honorarium Pegawai kontrak c. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai kontrak d. Biaya jaga malam e. Biaya Bintek Dewan Jamsosda | - 70.600.000,00 33.600.000,00 600.000,00 - 1.750.000,00 | |
| | 5.Biaya Administrasi : a. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Bapel.Jamsosda b. Honorarium Pegawai kontrak c. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai kontrak d. Biaya jaga malam e. Biaya Bintek Dewan Jamsosda | 70.600.000,00 33.600.000,00 600.000,00 - 1.750.000,00 | | 5.Biaya Administrasi : a. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Bapel.Jamsosda b. Honorarium Pegawai kontrak c. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai kontrak d. Biaya jaga malam e. Biaya Bintek Dewan Jamsosda | - 70.600.000,00 33.600.000,00 600.000,00 - 1.750.000,00 | |
| | 6.Pengadaan Barang a. Alat Tulis Kantor (ATK | | | 6.Pengadaan Barang a. Alat Tulis Kantor (ATK) dan | | |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|)dan buku cek giro | 6.530.260,00 | buku cek giro | 6.573.260,00 | |
| - Biaya pengadaan Blanko-blanko JKJ | 17.300.000,00 | - Biaya pengadaan Blanko- blanko JKJ | 17.300.000,00 | |
| - Biaya Foto Copy | 400.000,00 | - Biaya Foto Copy | 688.000,00 | |
| - Biaya alat-alat Kebersihankantor | 550.000,00 | - Biaya alat-alat Kebersihankantor | 550.000,00 | |
| - Biaya langganan surat kabar dan majalah dll. | 600.000,00 | - Biaya langganan surat kabar dan majalah dll. | 600.000,00 | |
| b. Rekening penggunaan Telepon | 17.034.210,00 | b. Rekening penggunaan Telepon | 17.034.210,00 | |
| c. Rekening penggunaan air | 261.000,00 | c. Rekening penggunaan air | 647.250,00 | |
| d. Biaya Banten dan Canangsari | 1.660.000,00 | d. Biaya Banten dan Canangsari | 1.660.000,00 | |
| e. Biaya bahan dan alat Listrik & Elektronik | 2.250.000,00 | e. Biaya bahan dan alat Listrik & Elektronik | 2.250.000,00 | |
| f Biaya rapat-rapat | 1.360.000,00 | f Biaya rapat-rapat | 1.360.000,00 | |
| g. Biaya Service peralatan komputer | 200.000,00 | g. Biaya Service peralatan komputer | 200.000,00 | |
| h. Biaya penggantian suku cadang komputer | 4.550.000,00 | h. Biaya penggantian suku cadang komputer | 4.550.000,00 | |
| i. Pengadaan Komputer note book | 14.925.000,00 | i. Pengadaan Komputer note book | 14.925.000,00 | |
| j. Biaya pengadaan kelengkapan komputer | 862.000,00 | j. Biaya pengadaan kelengkapan komputer | 862.000,00 | |
| k. Pengadaan Proyektor / LCD | 19.875.000,00 | k. Pengadaan Proyektor / LCD | 19.875.000,00 | |
| JUMLAH | 7.808.137.873,75 | JUMLAH | 7.433.657.733,00 | 374.480.140,75 |
| 6.Bantuan Penyelesaian Kartu dari Setda | - | 6.Bantuan Penyelesaian Kartu dari Setda | - | |
| JUMLAH | - | JUMLAH | - | - |
| 7. Bantuan Gakin Prop. Bali | - | 7.Pengeluaran Gakin Prop.Bali | - | |
| JUMLAH | - | JUMLAH | - | - |
| 8. Bantuan Gakin Pusat | - | 8.Pengeluaran Gakin Pusat | - | |
| JUMLAH | - | JUMLAH | - | - |
| 9. Askes (Biaya pengganti pencetakan kartu JKJ) | 43.650.000,00 | 9.a.Pengeluaran pemby.pasien ASKES | - | |
| JUMLAH | 43.650.000,00 | 9.b.Pengeluaran pendaftaran Peserta ASKES | - | |
| JUMLAH | 43.650.000,00 | JUMLAH | - | 43.650.000,00 |
| 10. Pajak Pemb.barang PPN & PPH | 11.209.364,00 | 10. Pajak Pemb.barang PPN & PPH | 11.209.364,00 | |
| JUMLAH | 11.209.364,00 | JUMLAH | 11.209.364,00 | - |
| JUMLAH SELURUHNYA | 9.809.310.428,22 | JUMLAH SELURUHNYA | 7.615.329.597,00 | 2.193.980.831,22 |

